

**PENERAPAN AKAD DALAM PRODUK IB SIAGA EMAS GADAI
BANK SYARIAH BUKOPIN KANTOR
CABANG MAKASSAR**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Ekonomi Islam
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

JAMALUDDIN

10200112073

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamaluddin
Nim : 10200112073
Tempat/ Tgl. Lahir : Mapilli, 18 September 1991
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Samata-Gowa
Judul : Penerapan Bentuk Aqad dalam Produk iB Siaga Emas
Gadai pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang
Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan skripsi yang dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Oktober 2016

Penyusun

Jamaluddin
10200112073

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penerapan Akad dalam Produk iB Siaga Emas Gadai pada Bank Syariah Bukopin Kantor cabang Makassar” yang disusun oleh Jamaluddin, NIM: 10200112073, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 22 November 2016 bertepatan dengan 22 Shafar 1438 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Makassar, Januari 2017
Raibul awal 1438

Dewan Penguji

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag
Sekertaris : Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si
Munaqisy I : Dr. Syaharuddin, M. Si
Munaqisy II : Drs. Thamrin Logawali, MH
Pembimbing I : Drs. Urbanus Uma Leu, M. Ag
Pembimbing II : Drs. Abd. Rasyid E., MH

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag
NIP.19581022 198703 1 002

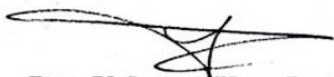
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi Saudara JAMALUDDIN, NIM: 10200112073, mahasiswa Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul, **“Penerapan Akad dalam Produk IB Siaga Emas Gadai pada Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Makassar”** memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

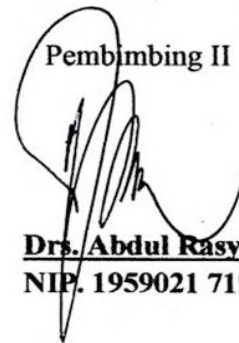
Makassar, 8 November 2016

Pembimbing I



Drs. Urbanus Uma Leu, M. Ag
NIP. 1950123 119920 3 1017

Pembimbing II



Drs. Abdul Rasyid, MH
NIP. 1959021 719903 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaiukum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji syukur tiada hentinya penulis haturkan kehadiran Allah swt yang Maha pemberi petunjuk, anugerah dan nikmat yang diberika-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Bentuk Aqad dalam Produk iB Siaga Emas Gadai Bank Syariah Bukopin Kantor cabang Makassar”. Allahumma Shalli a’la Sayyidina Muhammad, penulis curahkan kehadiran junjungan umat, pemberi syafa’at, penuntun jalan kebajikan, penerang di muka bumi ini, seorang manusia pilihan dan teladan kita, Rasulullah saw, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman, Amin.

Penulis merasa sangat berhutang budi pada semua pihak atas kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga sewajarnya bila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan semangat dan bantuan, baik secara material maupun spritual. Skripsi ini berwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan bagi penulis.

Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tuaku, **Ayahanda** dan **Ibundaku, Tondeng** dan **Radia** atas segala doa dan pengorbanannya yang telah melahirkan, mengasuh, memelihara, mendidik, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhitung sejak dalam kandungan

hingga dapat menyelesaikan studiku dan selalu memberikanku motivasi dan dorongan baik moril dan materil yang diberikan kepada penulis.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Porf. Dr. Musafir Pabbabari M.S selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I, II, dan III atas segala fasilitas yang diberikan dalam menimba ilmu didalamnya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta Wakil Dekan I, II, dan III atas segala fasilitas yang diberikan dan senantiasa memberikan dorongan, bimbingan dan nasihat kepada penulis.
3. Ibu Rahmawati Muin, S.Ag.,M.Ag dan bapak Drs. Thamrin Logawali, M.H selaku ketua dan sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan dorongan, bimbingan dan nasehat penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs, Urbanus Uma Leu, M. Ag dan Drs. Abdul Rasyid, MH selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Bapak Dr. Syaharuddin, M.Si dan Drs. Thamrin Logawali, M.H selaku penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

6. Pihak Bank Syariah, yaitu bapak Yudhi Ramadhian selaku Manajer Pelayanan & Operasional Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Makassar yang bersedia menerima dan bekerja sama dengan peneliti untuk mengadakan penelitian di bank tersebut.
7. Kepada teman-teman kelasku tercinta EKIS B dan rekan-rekan mahasiswa angkatan 2012 tanpa terkecuali terimakasih atas kebersamaannya menjalani hari-hari perkuliahan, semoga menjadi kenangan terindah yang tak terlupakan
8. Teristimewa kepada Hikmah Pratiwi Hafid, S.Ei, Muslihati, S.Ei, Sukriadi, S.Ei dan Erwin S.Pd yang senantiasa memberikan semangat dan membantu dalam penyusunan skripsi.
9. Terismewa pula kepada sahabat-sahabatku Wahyuddin, Hasbi, Fahri, Faiz, Furqan, Hardiansyah, Nismawati, Purnama, Nur Lhela Shanty, Rahma, Babol yang tak henti-hentinya selalu memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah swt, penulis memohon ridha dan maghfirah-Nya, semoga karya ini dapat bermanfaat kepada para pembaca. Aaamiiinn.

Gowa, Desember 2016

JAMALUDDIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-8
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus dan deskripsi Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	9-33
A. Perbankan Syariah.....	9
B. Konsep Aqad Gadai dalam Fiqhi Muamalah	17
C. Konsep Aqad Qardh dalam Fiqhi Muamalah.....	26
D. Konsep Aqad Ijarah dalam Fiqhi Muamalah.....	29
E. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34-39
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Sumber Data	35
D. Instrument Penelitian.....	35

E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37
G. Pengujian Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40-65
A. Gambaran Umum Bank Syariah Bukopin	40
B. Produk PT. Bank Syariah Bukopin	46
C. Mekanisme gadai Emas pada Produk iB Siaga Emas Gadai Bank Syariah Bukopin.....	48
D. Asumsi Perhitungan Gadai Emas pada Bank Syariah Bukopin ..	64
BAB V PENUTUP.....	65-66
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
RIWAYAT HIDUP.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Keterangan PT. Bank Syariah Bukopin	42
Tabel 4.2	: Ikhtisar Keuangan 2010-2014 PT. Bank Syariah Bukopin.....	45
Tabel 4.3	: Standar Logam Mulia Bank Syariah Bukopin	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Pola Transaksi Aqad gadai (rahn)	28
Gambar 2.2	: Pola Transaksi Aqad Qardh.....	32
Gambar 2.3	: Pola Transaksi Aqad Ijarah	35
Gambar 2.4	: Kerangka Pikir.....	36
Gambar 4.1	: Struktur PT. Bank Syariah Bukopin.....	46
Gambar 4.2	: Mekanisme Gadai Emas	51
Gambar 4.3	: Perbandingan Rukun Akad.....	58
Gambar 4.4	: Perbandingan Rukun Akad.....	59
Grafik 4.1	: Ikhtisar Keuangan 2010-2014 PT. Bank Syariah Bukopin	47

ABSTRAK

Nama : Jamaluddin

Nim : 10200112073

**Judul : PENERAPAN AKAD DALAM PRODUK IB SIAGA EMAS
GADAI BANK SYARIAH BUKOPIN KANTOR CABANG
MAKASSAR**

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana praktek gadai emas di Bank Syariah Bukopin (BSB)? dan apakah akad dalam produk iB Siaga Emas Gadai sesuai dengan prinsip Islam? Pokok masalah tersebut selanjutnya dirinci kedalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana metode pemberian pembiayaan kepada nasabah yang dilakukan BSB?, apakah setiap jumlah pinjaman oleh nasabah dari BSB memiliki jumlah pengembalian yang sama atau berbeda?, dan akad apa yang digunakan dalam produk pembiayaan iB Siaga Emas Gadai?, serta peneliti juga menindaklanjuti bagaimana praktek gadai dalam fatwa MUI DSN? dan bagaimana fatwa MUI DSN tentang gadai dalam sorotan ulama lain?

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari BSB dan wawancara serta data sekunder dari riset kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya di analisis dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek iB Siaga Emas Gadai, tidak memenuhi asas transparansi ketika melakukan akad antara pihak BSB dan nasabah. Selain itu, akad yang digunakan dalam produk iB Siaga Emas Gadai sesuai dengan fatwa MUI DSN, adapun ulama lain yang berpendapat bahwa tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dengan dasar yang kuat pada masing-masing para pakar.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Penulisan isi pasal dalam akad perlu diperbaiki dengan *font* minimal 12, dan untuk menghindari ketidaktransparansian dalam suatu akad mesti pihak BSB yaitu customer services menjelaskan semua isi pasal dalam akad pada nasabah sehingga benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. 2) akad yang digunakan dalam produk iB siaga emas gadai, selama masih dalam berbeda pendapat dari kalangan para pakar ekonomi Islam atau ulama, bagi para pelaku dalam menggunakan produk iB Siaga Emas Gadai di BSB agar memanfaatkan dengan baik sehingga mendatangkan mashlahat baik dari pihak nasabah maupun dari pihak BSB.

Kata kunci: Bank Syariah, Aqad, gadai emas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, setiap manusia pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Padahal, kebutuhan ini beraneka ragam, ada yang diutamakan, ada yang dinomorduakan, dan ada yang dapat dipenuhi di kemudian hari.

Mengenai kebutuhan manusia dimaksud dapat digolongkan tiga macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus diutamakan pemenuhannya setiap hari dan manusia tidak mungkin dapat mengelaknya, seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, mandi (perlu air, sikat gigi, odol, handuk), penunjuk waktu (jam), dan ongkos transpor. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan sekunder yang tingkatnya harus dipenuhi setiap hari tetapi manusia perlu memenuhinya, antara lain peralatan rumah tangga seperti meja kursi, tempat tidur, kulkas, televisi, selain itu menabung, sepeda motor, rekreasi, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi cenderung ke arah kemewahan dan biayanya juga mahal, seperti rumah, mobil, kebun, taman, bermain, dan kolam ikan.¹Dengan menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut baik manusia maupun perusahaan selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan.

¹Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 1-2

Manusia yang keberadaannya di tengah-tengah masyarakat selalu ingin mempertahankan hidupnya. Untuk itu, mereka harus bekerja atau berusaha supaya memperoleh penghasilan. Penghasilan ini merupakan sebuah modal yang penting dalam hidupnya. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya sebagaimana tersebut diatas, harus mempertimbangkan antara penghasilan dan pengeluaran. Biasanya suatu penghasilan yang diterima tiap bulan tidak habis dibelanjakan, akan tetapi disisihkan sebagian untuk ditabung dan digunakan jika sewaktu-waktu ada keperluan mendadak atau jika sudah banyak terkumpul dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau tersier.

Demikian juga perusahaan, jika perusahaan memperoleh laba, terlebih dahulu disisihkan untuk dana cadangan, dan sisanya dapat dibagikan kepada para pemodal atau pemegang saham. Ada juga yang berpikiran ingin dapat memenuhi kebutuhan sekunder atau tersier, kalau menabung harus menunggu waktu lama baru dananya terkumpul, sedangkan dilain pihak setelah dana terkumpul ternyata tidak cukup, karena seiring berjalannya waktu harga barang-barang selalu mengalami kenaikan. Akibatnya kebutuhan yang dikehendaki selalu gagal dan kesempatan menjadi tertunda-tunda.²

Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yang banyak terjadi adalah baik orang maupun perusahaan tidak membeli barang secara tunai melainkan secara cicilan atau kredit. Dilain pihak, produsen atau pedagang juga menawarkan barang-barang untuk dijual secara kredit bagi konsumen. Cara ini tampaknya lebih menguntungkan, karena segera dapat memiliki, dan menikmati barang,

²Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, h. 4

cicilan yang cukup terjangkau dan penghasilan tetap dapat memenuhi kebutuhan primer.

Bukan hanya perorangan, perusahaan juga banyak yang melakukan kredit, seperti kendaraan, kredit tanah dan bangunan untuk kantor, dan membayar angsuran dengan harga terjangkau, sehingga tidak mengganggu pendapatan dalam memenuhi kebutuhan dalam satu bulan. Oleh karena itu pada prinsipnya dalam kehidupan seseorang maupun perusahaan tidak terlepas dari transaksi utang piutang, yang dilatarbelakangi untuk pemenuhan suatu kebutuhan. Namun, dengan banyaknya segala bentuk utang piutang akan menjadi pertanyaan mengenai aplikasinya. Utang piutang sama dengan pinjam meminjam, dalam Islam dikenal dengan *qardh* atau *rahn* yang disertai dengan jaminan.

Qardh merupakan suatu proses dengan memberikan harta kepada orang yang ingin memanfaatkannya dan mengembalikannya pada suatu hari nanti tanpa ada syarat penambahan dari harta yang dipinjamkan.³ Berbeda pada *rahn* dengan menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang seperti emas agar hutang itu dilunasi atau dikembalikan jika tidak dapat mengembalikannya.⁴

Praktek semacam ini telah dilakukan oleh beberapa lembaga, salah satunya adalah perbankan syariah. Hal ini merupakan dalam rangka mengembangkan bisnis perbankan syariah di Indonesia, sehingga para praktisi bank syariah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan produk-produk baru, seperti Emas Gadai. Dalam konteks Emas Gadai di bank syariah secara umum

³Abudullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqhi Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), h. 155.

⁴Abudullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqhi Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, h. 174.

yang berkembang hanya aset berupa emas yang dapat dijadikan objek gadai. Emas tersebut bisa meliputi; perhiasan emas, koin emas, uang emas dan emas batangan/lantakan. Salah satu bank syariah yang menerapkan gadai emas ini adalah Bank Syariah Bukopin.

Mekanisme gadai di bank syariah bukopin ketika nasabah dan pihak bank syariah (Customer Services) ingin melakukan akad, kertas akad yang disodorkan oleh Customer Services (CS) langsung dibubuhi tanda tangan oleh nasabah tanpa membacanya secara seksama. Timbul pertanyaan bagi peneliti apakah nasabah mengetahui isi akad tersebut?, Selain dari pada itu, Emas Gadai di Bank Syariah secara umum menggunakan akad *qardh* dan akad *ijarah*. Berdasarkan apa yang dijelaskan peneliti sebelumnya bahwa akad *qardh* merupakan akad hutang piutang yang menjelaskan tanpa ada jaminan melainkan akad *rahn*-lah yang menggunakan jaminan. Selain akad *qardh* terdapat pula akad *ijarah* yang digunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat penyimpanan & pemeliharaan jaminan emas di bank. Hal ini timbul pernyataan bahwa terdapat dua akad dalam transaksi gadai emas

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik membahas lebih dalam mengenai Gadai Emas yang dihubungkan dengan penerapannya secara riil di salah satu Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Bukopin (BSB) Untuk itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Aqad dalam Produk iB Siaga Emas Gadai Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Makassar”**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus pada penelitian ini diarahkan pada kesesuaian aqad yang digunakan oleh Bank Syariah Bukopin dengan aqad secara prinsip syariah. Adapun ruang lingkup yang diteliti meliputi penggunaan aqad qardh, aqad rahn dan aqad ijarah oleh Bank Syariah Bukopin Makassar dalam produk ib siaga emas gadai, serta bagaimana mekanisme dalam praktek gadai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan, dan agar pembahasan dalam skripsi ini teratur dan sistematis, maka perlu dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek Gadai Emas di Bank Syariah Bukopin ?
2. Apakah aqad dalam produk IB SIAGA EMAS GADAI sesuai dengan prinsip Islam ?

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu mengenai gadai emas telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Galis Kurnia Afdhil dengan judul “Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang” penelitian ini bersifat kualitatif dengan hasil penelitian bahwa Perusahaan tidak sepenuhnya berseberangan dengan konsep dasar pembiayaan Rahn yang ditetapkan oleh DSN MUI. Dalam transaksinya terdapat

beberapa aspek yang telah memenuhi fatwa DSN MUI dan dapat dijadikan contoh bagi lembaga keuangan syariah lain yang belum memenuhinya. Namun demikian, ada pula beberapa rekomendasi yang peneliti berikan terkait adanya perbedaan antara praktik dan konsep dasar pembiayaan Rahn. Dalam pembiayaan gadai syariah terdapat beberapa aspek yang harus disesuaikan oleh perusahaan, yaitu mengenai penetapan tarif ujroh yang secara substantif masih berdasarkan pinjaman, biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman, serta adanya penggabungan akad rahn dan ijarah. Selain hal tersebut, dalam hal penjualan barang jaminan pihak Pegadaian Syariah telah menerapkan ketentuan fatwa DSN MUI dengan baik.

Selain penelitian yang dilakukan oleh Galis Kurnia Afdhil adapula penelitian yang lain yang mengungkap kesyariahan praktek gadai pada perusahaan. Adapun penelitian tersebut dilakukan oleh Arrum Mahmudahningtyas pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Kesyariahan Transaksi Rahn Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang)” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil bahwa praktek gadai dalam pegadaian syariah tidaklah bersifat prinsip syariah atau bisa dikatakan transaksi yang tidak diperbolehkan karena menggunakan dua akad dalam satu transaksi yaitu akad rahn dan akad ijarah. Hal ini juga diperkuat oleh hadits Nabi yang diriwayatkan dari Amru bin Syu’aib; “Nabi melarang menggabungkan antara akad jual beli dan akad qardh” (HR. Ahmad; sanad hadits ini dinyatakan hasan oleh Tarmidzi) juga tidak memperbolehkan praktik penggabungan dua akad.

Dari uraian diatas dua peneliti mengemukakan bahwa gadai emas di pegadaian syariah pada lokasi tertentu tidak sesuai dengan syariah pada umumnya karena menggunakan dua akad dalam satu transaksi yaitu akad rahn dan akad ijarah, selain itu pada penelitian yang diungkap oleh Galis Kurnia Afdhil mengatakan bahwa juga terdapat pemberian ujroh yang tidak sesuai dengan syariah karena besarnya tarf ujroh berdasarkan pada pinjaman

Peneliti yang penulis lakukan juga mencoba melihat lebih jauh lagi bagaimana praktek gadai dalam suatu perusahaan dapat menimbulkan dua akad dalam sekali transaksi, namun, jika dua penulis sebelumnya melakukan penelitian di pegadaian syariah maka penulis akan meneliti pada bagian sektor perbankan berlabel syariah yang merupakan lembaga khusus yang menyediakan layanan finansial secara prinsip Islam. Peneliti akan melihat lebih jauh bagaimana praktek gadai emas di bank syariah dan bagaimana sistem akad yang diterapkan.

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme gadai emas dalam prakteknya di Bank Syariah Bukopin
2. Untuk mengetahui kesesuaian secara syariah dengan produk gadai emas di Bank Syariah Bukopin

Selain tujuan penelitian ini juga memiliki kegunaan sebagai berikut:

a. Bagi akademis

Sebagai tambahan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan penggunaan aqad dalam gadai serta perhitungannya. Sekaligus untuk memperkaya pengetahuan dan memupuk kegiatan dalam prinsip syariah terhadap pengguna gadai emas.

b. Bagi lembaga keuangan

Sebagai bahan acuan dan informasi bagi lembaga keuangan khususnya Bank Syariah Bukopin dalam melakukan praktek gadai emas secara syariah baik dari segi aqad, perhitungan maupun mekanismenya.

c. Bagi masyarakat (nasabah bank syariah)

Sebagai informasi tambahan dalam mempertimbangkan penggunaan produk gadai emas di PT Bank Syariah Bukopin khususnya Bank Syariah Bukopin Makassar.

d. Perguruan tinggi

Penelitian ini akan menambahkan keperpustakaan dibidang ekonomi Islam dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang berisikan suatu studi perbandingan yang bersifat karya ilmiah untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya tentang perbankan syariah.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Perbankan Syariah

Istilah bank telah menjadi istilah umum yang banyak dipakai di masyarakat dewasa ini. Palang merah punya “bank darah”, dilingkungan kesehatan ada “bank sperma”, lembaga penelitian punya “bank data”, dan orang atau lembaga yang mengalami keruntuhan keuangan disebut *bankrupt*. Tentu saja yang akan dibahas bukan bank-bank semacam itu, melainkan bank dalam arti suatu lembaga intermediasi keuangan yang paling penting dalam sistem perekonomian Indonesia, yaitu lembaga khusus yang menyediakan layanan finansial dalam ruang lingkup berlabel syariah yaitu Bank Syariah.

1. Pengertian Bank Syariah

Kata bank dapat ditelusuri berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan *banco* dari bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku. Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya. Dewasa ini peti-bank berarti portofolio aktiva yang menghasilkan (*portfolio of earning assets*), yaitu portofolio

yang memberi bank “darah kehidupan” bernama laba bersih setelah pengeluaran-pengeluaran dan pajak.⁵

Pengertian bank menurut undang-undang republik Indonesia No 21 Tahun 2008 pasal 1 (satu) ayat 2 (dua) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank jika dilihat dari segi kepemilikannya dapat dibagi menjadi beberapa yaitu bank milik pemerintah (bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah) seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Republik Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Bank milik swasta nasional (bank yang didirikan oleh swasta baik individu, maupun lembaga) seperti BCA, Bank Permata, Bank Muamalat Indonesia, Bank danamon. Bank milik koperasi (bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi) seperti Bank Umum Koperasi Indonesia. Bank milik asing (cabang dari bank yang ada diluar negeri baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara) seperti; ABM AMRO Bank, Bank Of Tokyo, City Bank, dan bank milik campuran (bank yang saham-sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional yang kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga

⁵Irwan Misbach, *Bank Syariah, kualitaslayanan, kepuasan, dan kepercayaan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 17

negara Indonesia) seperti; Sumitomo Niaga Bank, Bank Mericorp, Bank Sakura Swadarma.⁶

Uraian diatas adalah mengenai bank secara umum. Adapun bank jika dilihat dari segi jenis atau sistem pengelolaanya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan kedua bank tersebut secara umum terletak pada prakteknya dimana bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Sebelum sampai ketitik pembahasan atau definisi dari bank syariah, perlu ditinjau secara teoritis mengenai definisi syariah itu sendiri.

Syariah artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju kearah sumber kehidupan. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, syariah adalah suatu kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan, dan kebaikan.⁷

Jadi dari penjelasan diatas secara umum dapat dimaknai bahwa dengan adanya syariah maka dapat membangun dan menjaga kemashlahatan ummat manusia. Kemashlahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemashlahatan itu berlaku bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia.

⁶Kasmir, *bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 33

⁷ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah*, (Jakarta; Kencana, 2015), h. 41

Sebagian besar umat Islam mempercayai bahwa Allah tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali untuk kemashlahatan hamba-hambaNya. Jika di dalam suatu hukum tidak ada kemashlahatan, maka hukum tersebut dapat dipastikan bukan diturunkan dari Allah. Ada beberapa hukum yang tidak mengandung mashlahah. Dan ketika ditelusuri secara seksama, hukum semacam itu biasanya merupakan hasil dari ijtihad atau takwil manusia yang mungkin sesuai untuk konteks tertentu akan tetapi tidak sesuai untuk konteks yang lainnya.

Jadi satu titik awal yang harus digarisbawahi adalah tujuan syariah bermuara pada kemashlahatan untuk menegakkan manusia sebagai makhluk sosial yang mana ia harus bertanggung jawab atas dirinya dan pada akhirnya nanti pada Allah. Sehingga kehidupan yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.

Dapat dibayangkan setika kata “Syariah” di tambah dengan kata “Bank” sebelum kata “Syariah” sehingga tercipta kata “Bank Syariah” memiliki makna yang sangat luar biasa. Jika ditinjau kembali “Bank” adalah lembaga finansial yang dimana finansial sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan “Syariah” itu sendiri membawa kemashlahatan untuk masyarakat. Sehingga “Bank Syariah” dapat menjadi objek untuk memenuhi kemashlahatan masyarakat dan menjadi salah satu penyebab terciptanya keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan.

Bank Islam atau Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan

kegiatan usahanya. Menurut Antonio dan Perwataatmadja yang dikutip oleh Ismail dalam buku Perbankan Syariah, bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits.⁸

Salah satu ciri yang dapat dilihat dari kesyariahannya bank syariah adalah dengan menggunakan aqad dalam produk bank syariah yang sesuai dengan kaidah Islam, dan jika ada praktek bank syariah yang tidak ada ketentuan dan pelarangannya dalam alquran dan alhadits maka kaidah yang berlaku yaitu segala sesuatu itu diperbolehkan kecuali ada larangannya.

Prinsip yang dilarang dalam lembaga keuangan syariah untuk menjalankan kegiatan usahanya yaitu:

- a. Maysir (Spekulasi); secara bahasa maknanya judi, secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan.
- b. Gharar; secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidak pastian, secara umum adalah sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, dan syahwat
- c. Haram; secara bahasa berarti larangan dan penegasan, larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan yaitu dilarang oleh tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal.
- d. Riba; secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh, secara umum penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan atau dalam

⁸Irwan Misbach, *Bank Syariah, kualitas layanan, kepuasan, dan kepercayaan*, h. 19.

transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.

- e. Batil; secara bahasa artinya batal tidak sah dalam aktivitas jual beli yang dimana Allah sudah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara batil.⁹

2. Akad Bank Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Akad (perikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqhi, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu).¹⁰

Sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undang-undang dasar hukum perikatan berdasarkan KUHPERDATA terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian)

⁹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta; Kencana, 2015), h. 34

¹⁰Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 35.

2. Perikatan yang timbul dari undang-undang
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan sukarela

Menurut pasal 1338 ayat 1 KUHPERDATA menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas :

- a. Kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya.
- b. Konsensualisme adalah jika suatu kontrak telah dibuat maka pada prinsipnya persyaratan penyerahan tertulis pun tidak diisyatkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu yang memang dipersyaratkan tertulis.
- c. Pacta Sunt Servanda (kepastian hukum), artinya kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat).¹¹
- d. Asas kepribadian (*personality*), yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.
- e. Asas i'tikad baik, merupakan asas kerugian yang berdasarkan i'tikad baik antara para pihak tidak dapat dituntut darinya.

¹¹ Abdul R saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta; Kencana, 2005), h. 40.

- f. Asas *force majeure*, dalam konteks hukum adalah klausa yang memberikan dasar pemaaf pada salah satu pihak dalam suatu perjanjian untuk menanggung sesuatu hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
- g. Asas *expectatio non adimpleti contractus*, adalah pihak yang satu boleh saja tidak melaksanakan perjanjian itu selama dia bisa mengatakan bahwa “kamu dulu yang melaksanakan perjanjian itu kemudian saya, karena bila kamu tidak melaksanakan perjanjian itu maka kamu jangan menuntut saya.
- h. Asas *Obligatoir*, suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata mata. Sedangkan prestasi belum dapat dipaksakan karena kontrak kebendaan belum terjadi.

Akad dilakukan berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Prinsip tersebut dapat ditemukan dalam asas KHES tentang akad pasal 21 yaitu sbb:

1. Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
2. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
3. Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

4. Luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
5. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
6. Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
7. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
8. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
9. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
10. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
11. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram

Berbagai jenis perikatan atau perjanjian atau akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu:

- a) Pola titipan, seperti *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*
- b) Pola pinjaman, seperti *qardh* dan *qardhul hasan*
- c) Pola bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musharakah*
- d) Pola jual beli, seperti *murabahah*, *salam*, dan *Istishna*
- e) Pola sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*
- f) Pola lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*.¹²

B. Konsep Akad Gadai Dalam Fiqhi Muamalah

1. Pengertian akad gadai (rahn)

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *al-rahn*. Kata *al-rahn* berasal dari bahasa arab “*rahana, yarhanu, rahnan*” yang berarti menetapkan sesuatu. Secara istilah menurut Ibn Qudamah, pengertian *al-rahn* adalah *al-mal al-ladhi yuj'alu wathiqatan bi daynin yustaufa min thamanihi in ta'adhara istifa'uhu mimman huwa 'alayh* “suatu benda yang dijadikan kepercayaan atas utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.”¹³

Pengertian gadai juga dapat ditemukan dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Gadai diberikan atas benda bergerak
- b. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai

¹² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 41.

¹³ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012) h. 27-28.

- c. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur
- d. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan utang tersebut.

Oleh karena itu, makna gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, ruguhan, cagar, dan tanggungan.¹⁴

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *rahn* (gadai) ada empat sebagai berikut:

1. Barang yang digadaikan
2. Modal hasil gadaian
3. *Shighah*
4. '*aqdain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai).¹⁵

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *rahn* (gadai) hanya satu yaitu *shighah* karena ia sebagai hakikat transaksi. Adapun selain *shighah* maka bukan termasuk substansi *rahn* (gadai). Demikian ini berangkat dari pendapat mereka tentang transaksi secara keseluruhan.

Syarat-syarat *rahn* (gadai) adalah sebagai berikut:

¹⁴ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, h. 28

¹⁵ Abudullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqhi Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, h. 175.

- a. Masing-masing dari *al-iqdani* (dua pihak yang melakukan transaksi) termasuk orang yang boleh membelanjakan harta, yakni baligh, berakal sehat, dan pandai
- b. Gadaian dilakukan dengan hutang yang wajib
- c. Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan untuk membayar hutang atau dapat dijual untuk membayar hutangnya jika ia tidak dapat membayar
- d. Barang yang digadaikan milik penggadaian atau ia mendapat izin menggadaikan

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang *Rahn* disebutkan ketentuan rahn dalam gadai syariah :

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali atas seizing Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, tetapi dapat dilakukan juga oleh Murtahin sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5. Penjualan Marhun: (1) Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya; (2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun akan dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah; (3) hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan; (4) kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Ketentuan tentang gadai emas syariah tetap berpedoman pada fatwa DSN Nomor 25/DSN-MU/III/2002 tentang Rahn dengan beberapa ketentuan tambahan yang kemudian disebut Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MU/III/2002 berikut :

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
3. Ongkos sebagaimana yang dimaksud ayat 1 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

2. Hukum gadai

“Rahn (gadai) hukumnya boleh berdasarkan dalil dari al-quran, hadits, dan ijma’”.¹⁶

a. Dasar *rahn* (gadai) dari Qs. Al-baqarah: 283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً

Terjemahan:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Firman Allah: wa in kuntum ‘alaa safarin (“Jika kamu dalam perjalanan”)

Yakni, sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang-piutang sampai batas waktu tertentu; wa lam tajiduu kaatiban (“Sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis.”) Yaitu seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Ibnu Abbas mengatakan: “Atau mereka mendapatkan penulis, tetapi tidak mendapatkan kertas, tinta atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang oleh pemberi pinjaman. Maksudnya, penulisan itu diganti dengan jaminan yang dipegang oleh sipemberi pinjaman.”

¹⁶Abudullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqhi Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, h. 226.

Firman Allah Ta'ala: *fari Haanum maqbuudlatun* (Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang) Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana yang menjadi pendapat Imam Syafi'I dan jumhur ulama. Dan ulama yang lain menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada ditangan orang yang memberikan gadai. Ini merupakan riwayat dari Imam Ahmad. Sekelompok ulama lain juga berpendapat demikian.

b. Dasar dari hadits diantaranya adalah hadits yang bersumber dari Aisyah

Radiyahallahu anhu:

Artinya: “jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kalian tidak mendapati seorang penulis, hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang” (Riwayat al-bukhari dan Muslim)

c. Dasar dari Ijma' adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkannya *rahn* (gadai) secara syariat ketika bepergian dan ketika dirumah (tidak bepergian).

3. Manfaat gadai

Pendapat yang dikemukakan ulama *Hanabilah* menafsirkan bahwa barang jaminan ada kalanya hewan yang dapat ditunggangi dan diperah, serta ada kalanya bukan hewan. Jika yang dijaminkan berupa hewan yang dapat ditunggangi, pihak *murtahin* dapat mengambil manfaat barang jaminan tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya sesuai dengan biaya perawatan tanpa seizin *rahin*. Namun, jika *murtahin* meminta izin kepada *rahin* untuk memanfaatkan barang gadaian tanpa kompensasi dan modal dari gadai dianggap sebagai hutang, maka yang demikian ini

tidak sah karena telah menjadi hutang dengan menarik manfaat. Hal ini berdasarkan hadits: “punggung hewan dikendarai jika digadaikan, air susu hewan perahan diminum jika digadaikan, dan orang yang mengendarai dan meminumnya wajib mengeluarkan nafqahnya”

Imam *Shafi'iyah* mengatakan bahwa manfaat dari barang jaminan adalah hak rahin, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi murtahin. Pandangan Imam *Shafi'iyah* tersebut sangat jelas bahwa yang berhak mengambil manfaat barang jaminan adalah rahin dan bukan murtahin, walaupun barang ada dibawah kekuasaan murtahin. Argumentasi shafi'i dikuatkan dengan hadits: “Dari Abu hurayrah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah saw, barang gadai itu tidak dimiliki (oleh penerima gadai), baginya keuntungan atas kerugian”.(HR. Hakim).¹⁷

Hadits tersebut menunjukkan bahwa pihak rahin berhak mengambil manfaat dari barang yang telah dijaminkannya selama pihak rahin menanggung segala risikonya. *Shafi'iyah* mengungkapkan bahwa rahin memiliki hak sepenuhnya atas barang jaminan selama tidak mengurangi nilai barang tersebut, misalnya barang yang dapat dikendarai, digunakan dan ditempati karena memanfaatkan dan mengembangkan barang jaminan tersebut tidak berkaitan dengan utang. Namun, jika barang jaminan yang nilainya dapat berkurang, seperti membangun atau menanam sesuatu pada tanah garapan, pada prinsipnya tidak diperkenankan kecuali ada izin dari murtahin demi menjaga haknya.

¹⁷Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, h. 39.

Kalangan hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apapun jenis dan bentuk barang tersebut, baik kendaraan, tempat tinggal, dan lainnya, kecuali penerima gadai mengizinkannya, hal ini juga berlaku bagi penerima gadai, dia tidak diperbolehkan memanfaatkan barang gadai atau jaminan kecuali diizinkan oleh pihak yang menggadaikan. Argumentasi kalangan hanafiyah, Karena hak menahan barang tersebut berada ditangan penerima gadai.¹⁸

Imam Ahmad berpendapat bahwa boleh mengambil manfaat barang hanya pada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya, namun bagi barang lainnya, kemanfaatannya tetap pada rahin. Argumentasi Imam Ahmad atas pendapatnya tersebut dijelaskan dalam dua pandangan berikut:

- a. Kebolehan murtahin mengambil manfaat barang jaminan yang dapat ditunggangi dan diperah. Hadits tersebut membolehkan murtahin untuk memanfaatkan barang jaminan atas seizin dari rahin, dan nilai pemanfaatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya untuk barang tersebut.
- b. Tidak bolehnya murtahin mengambil manfaat barang selain dari barang yang dapat ditunggangi dan diperah susunya.¹⁹ Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw:

Artinya: "dari Abu Hurayrah r.a ia berkata, bersabda Rasulullah Sa; apabila ada ternak dijamin, punggungnya boleh dinaiki (oleh murtahin) karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Jika ternak digadaikan air susunya yang deras

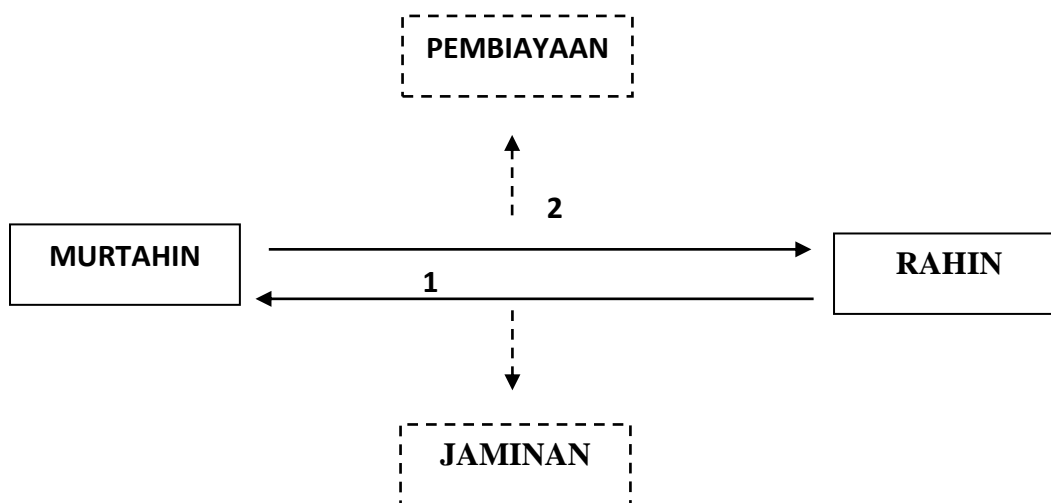
¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqhi Muamalah Kontemporer*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2016), h. 199

¹⁹ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, h. 40.

boleh diminum karena ia telah mengeluarkan biaya, kepada orang yang naik dan minum ia harus mengeluarkan biaya perawatannya” (HR. Abu Hurayrah)

4. Pola Transaksi Aqad Rahn (Gadai)

Gambar 2.1 Pola Transaksi Aqad Rahn



Sumber: data yang diolah

Rahin dan *murtahin* melakukan akad *rahn*. *Rahin* memberikan barang jaminan kepada *murtahin* dengan niat untuk menggadaikan barang jaminan tersebut, dan *murtahin* menyimpan barang jaminan dan memberikan dana pinjaman (pembiayaan) kepada *rahin*.

C. Konsep Aqad Qardh dalam Fiqhi Muamalah

1. Pengertian aqad qardh

Qardh secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya. Qardh adalah bentuk masdhar yang berarti

memutus. Dikatakan, *qardhtu asy-syai'a a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. Al-Qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Secara terminologis qardh adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.²⁰

Rukun dari akad qardh yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), dan *muqridh* (pemberi pinjaman)
- b. Objek akad yaitu *qardh* (dana)
- c. Tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan
- d. *Shighah*, yaitu *Ijab dan Qabul*²¹

Sedangkan syarat dari akad *qardh* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

- a. Kerelaan kedua belah pihak
- b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal

2. Hukum Syar'i dan Dasar Hukum Qardh

Dasar disyariatkannya qardh (hutang piutang) adalah al-quran, hadits dan ijma'.²²

- a. Dasar dari alquran adalah firman Allah *subhana wa ta'ala* dalam Qs. Albaqarah: 245

²⁰Abudullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqhi Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, h. 153.

²¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, h. 48.

²²Abudullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqhi Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, h. 153-155.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahan:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Sisi pendalian dari ayat diatas adalah bahwa Allah *subhana wa ta'ala* menyerupakan amal shalih dan memberi infaq fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang, amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

b. Dasar dari hadits adalah riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi'

Radhiyallahu 'anh yang artinya:

“sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam berhutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi' untuk membayarkan unta muda laki-laki itu. Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata ‘saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun’. Beliau menjawab ‘berikan unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang’.

c. Dasar dari ijma' adalah bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya hutang piutang.

Hukum qardh (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.²³

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang yang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberi hutang tapi jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Dan jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang maka ia tidak boleh berhutang, akan tetapi seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.

²³Abudullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqhi Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, h. 157.

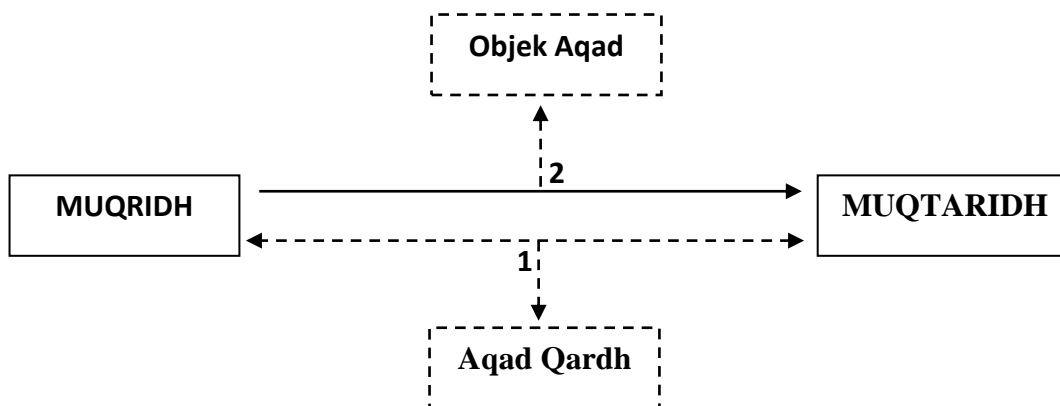
3. Tambahan pada Qardh

Ada dua macam penambahan pada qardh (hutang piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Penambahan yang disyariatkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyariatkan, seperti perkataan: “aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba berdasarkan sabda Rasulullah Saw: “setiap hutang piutang yang menarik manfaat adalah riba”
- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar al-qardh (hutang piutang).

4. Pola Transaksi Aqad Qardh

Gambar 2.2 Pola Transaksi Aqad Qardh



Sumber: data yang diolah

Muqtaridh dan *muqridh* melakukan akad *qardh*. *Muqtaridh* meminjam dana kepada *Muqridh*, dan *muqridh* memberikan dana kepada *muqtaridh*, kemudian akan mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjam pada saat akad.

D. Konsep Akad Ijarah dalam Fiqhi Muamalah

1. Pengertian Ijarah

Secara etimologis ijarah berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan. Adapun ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.²⁴

Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

- a. Pelaku akad; yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset
- b. Objek akad; yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa),
- c. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*²⁵

Syarat ijarah yang harus penuhi dalam transaksi baik *musta'jir* maupun *mu'jir* ada beberapa yaitu:

²⁴Abudullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqhi Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, h. 311.

²⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 101.

- a. Kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal
- b. Menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah
- c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna
- d. Objek ijarah boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat
- e. Manfaat dari objek yang diijarahkan harus yang dibolehkan agama, maka tidak boleh ijarah terhadap maksiat. Seperti mempekerjakan seseorang untuk mengerjakan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain
- f. Upah/sewa dalam akad harus jelas dan sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

2. Dasar Hukum Syariat Akad Ijarah

Ijarah disyariatkan berdasarkan al-quran, hadits, dan ijma'.²⁶ Dasar dari alquran adalah sebagaimana firman Allah ta'ala:

Terjemahan: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”

Ayat diatas merupakan dalil disyariatkannya ijarah, yakni Allah Swt memerintah seorang ayah supaya memberikan upah kepada istrinya yang menyusui anaknya. Allah Swt membolehkan mengambil upah menyusui, ini berarti juga boleh pada pekerjaan lainnya yang sejenis.

²⁶ Abudullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqhi Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, h. 313.

Dasar dari hadits adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan lainnya dari Abu Hurairah Radiyallahu ‘anh, dari Nabi Saw. Beliau bersabda yang artinya:

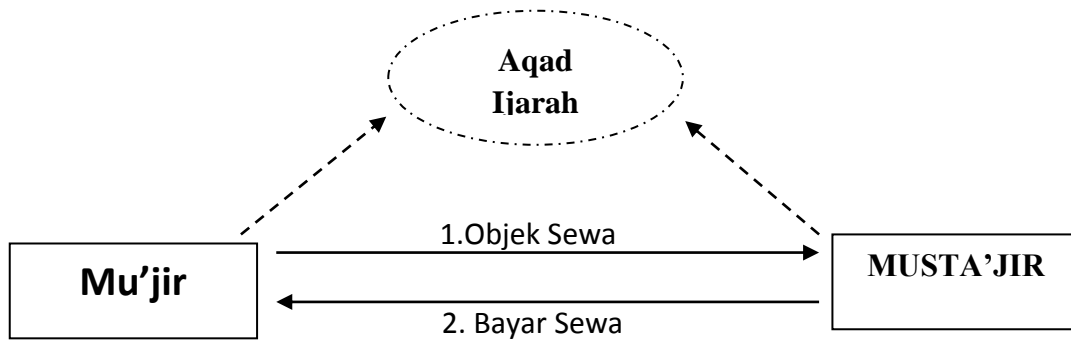
“Allah berfirman, ada tiga orang yang aku menjad musuhnya pada hari kiamat seseorang yang memberi janji kepada-Ku kemudian mengkhianati; seseorang yang menjual orang merdeka, lalu memakan harganya; dan seseorang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaannya tetapi ia tidak memberikan upahnya”

Dasar dari ijma’ adalah bahwa ulama Islam mula dari sahabat, tabi’in, dan imam yang empat sepakat disyariatkannya ijarah. Ibnu qudamah rahimahullah menyatakan bahwa ulama dari seluruh generasi dan diseluruh negeri sepakat diperbolehkannya ijarah.

Pada asalnya, transaksi ijarah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, masing-masing yang melakukan transaksi tidak boleh membatalkan transaksi sepihak kecuali ada hal-hal yang merusak transaksi yang telah mengikat, seperti adanya aib, hilangnya manfaat, dan lain-lain. Demikian ini pendapat mayoritas ulama, pendapat ini berdasarkan firman Allah yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu..”

3. Pola Transaksi Aqad ijarah

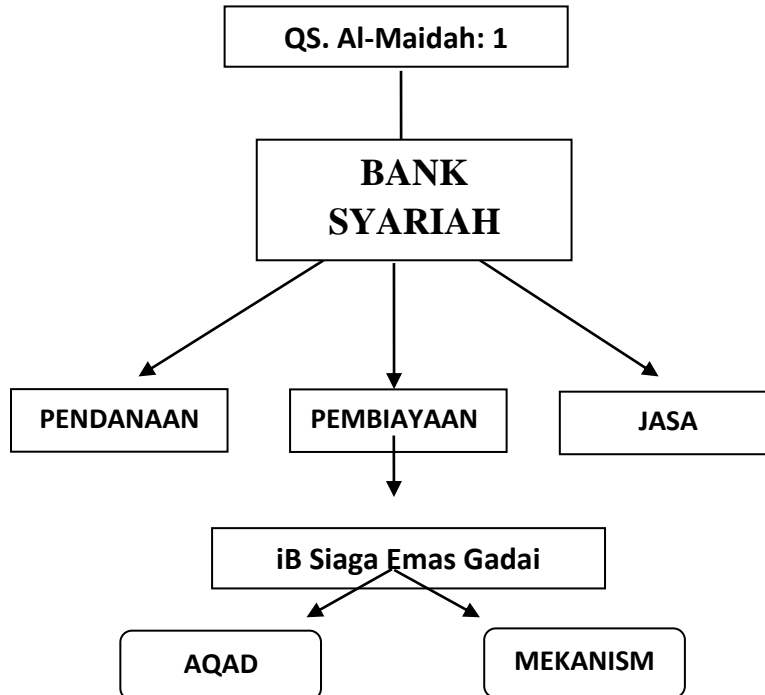
Gambar 2.3 Pola Transaksi Aqad Ijarah



Sumber: data yang di olah

E. Kerangka Pikir

Gambar 2.4 Kerangka Pikir



Sumber: data yang diolah

Salah satu penentu kesyariahan dalam transaksi adalah aqad dan mekanisme transaksinya, sebagaimana dalam Qs. Almaidah: 1 mengatakan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa seseorang datang kepada Ábdullah bin Mas’ud. a seraya mengatakan, ”Berpesanlah kepadaku”. Ibnu Mas’ud mengatakan, “Jika engkau mendengar Allah berfirman, *“Hai orang-orang yang beriman,”* maka dengarkanlah baik-baik; karena hal itu bias berupa kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang harus dijauaskan.” Dari Khaitamah, ia mengatakan, “Segala sesuatu dalam Al Quran (yang diawali dengan), *“Hai orang-orang yang beriman,”* maka hal itu dalam Taurat dinyatakan dengan , “Hai orang-orang miskin”

‘Ali bin Abi Thalhah menurut kandar ibnu ‘Abbas tentang firman-Nya,” Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”Yakni janji-janji. Maksudnya apa yang dihalalkan Allah dan apa yang di haramkan-Nya, janganlah kalian khianati dan kalian langgar.

Selama aqad yang ada pada produk Bank Bukopin Syariah dalam hal ini produk “iB SiAga Emas gadai” dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan mekanisme transaksinya juga berdasarkan pada prinsip Islam dan ada landasan dari Al-quran dan Hadits maka praktek tersebut bisa dikatakan syari’i.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.⁵²

Secara keseluruhan Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada di lapangan. Dalam hal ini, penelitian pada bank syariah bukopin.

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di PT Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Makassar, Jl. Dr. Ratulangi No. 98 Makassar 90125

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. Empiris dalam ilmu filsafat menekankan pada pengalaman sebagai sumber dari ilmu pengetahuan. Dan jika kita telaah menurut asal bahasanya, maka empiris berasal dari bahasa Yunani, yaitu *empiria* yang artinya coba-coba, pengalaman atau

⁵²Basrowi dan Suwandi, *Mamahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.2.

pengamatan. Disini saya coba menyimpulkan pandangan empiris dari 2 pengertian ini, yaitu suatu cara menemukan pengetahuan dengan cara mengamati dan coba-coba. Dalam hal ini peneliti menganalisis Gadai Emas secara riil di bank syariah bukopin.

C. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.⁵³

Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bank syariah bukopin dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari riset kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan memahami buku, artikel, jurnal, majalah atau data dari internet yang berkaitan dengan riset ini.

D. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei.⁵⁴ Istilahnya instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda yang dalam

⁵³Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), Edisi 3, h. 148.

⁵⁴Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 59.

penelitian ini meliputi pedoman wawancara, pedoman observasi, alat tulis, kamera, serta *handphone*.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *Field research* (penelitian lapangan), yakni suatu metode pengumpulan data dilapangan dengan memilih lokasi Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Makassar. Dalam penelitian lapangan ini penulis mengumpulkan data dengan beberapa cara:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁵⁵ Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, metode ini akan dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada objek penelitian seperti dengan cara mengamati keadaan sekitar bank syariah bukopin kantor cabang makassar, proses pelayanan nasabah, serta fasilitas yang ada di bank syariah bukopin kantor cabang makassar.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁵⁶ Wawancara biasanya dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara

⁵⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.63.

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Resdakarya, 2009), h. 186.

lisan dari seseorang (yang lazim disebut responden) dengan berbicara langsung (face to face) dengan orang tersebut.⁵⁷ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa pegawai dalam bank syariah bukopin untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan dianggap akurat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dimaksudkan untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan.

F. *Teknik Analisis Data*

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.⁵⁸ Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

⁵⁷Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, h. 69.

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta CV, 2013), h.430.

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing /Verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

G. *Pengujian Keabsahan Data*

Untuk menguji kredibilitas data penelitian, peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Teknik triangulasi data adalah menyaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapat dari sumber-sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel.

Sugiyono membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian apa yang dikatakan sepanjang waktu
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Jadi setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data hasil dari penelitian itu digabungkan sehingga saling melengkapi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Bukopin (BSB)

1. Profil PT. Bank Syariah Bukopin

PT BANK SYARIAH BUKOPIN (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Pada tahun 2001 sampai akhir 2002 proses akuisisi oleh Organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari (BI) nomor 5/4/KEP. DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang

dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008, kegiatan operasional Perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Sampai dengan akhir Desember 2014 Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 8 (delapan) Kantor Cabang Pembantu, 5 (lima) Kantor Kas, 1 (satu) unit mobil kas keliling, dan 76 (tujuh puluh enam) Kantor Layanan Syariah, serta 27 (dua puluh tujuh) mesin ATM BSB dengan jaringan Prima dan ATM Bank Bukopin.⁶⁶

⁶⁶ www.syariahbukopin.co.id, diakses 31 Juli 2016, jam 16.30 WITA

Tabel 4.1 Keterangan PT. Bank Syariah Bukopin

SUBJEK	KETERANGAN
Nama Bank	PT BANK SYARIAH BUKOPIN
Alamat	Jalan Salemba Raya Nomor 55 Salemba, Jakarta Pusat 10440
Telepon	021 – 2300912
Fax	021 – 3148401
Homepage	www.syariahbukopin.co.id
Email	corsec@syariahbukopin.co.id
Facebook	Bank Syariah Bukopin
Twitter	@BsyariahBukopin
Tanggal Berdiri	29 Juli 1990
Mulai Beroperasi	9 Desember 2008
Modal Dasar	Rp 1.000.000.000.000
Modal Disetor	Rp 650.370.000.000
Ekuitas	Rp 501.282.000.000
Kantor Layanan	1 Kantor Pusat & Operasional 11 Kantor Cabang 8 Kantor Cabang Pembantu 5 Kantor Kas 1 Mobil Kas Keliling
Layanan Syariah Bank	76 Layanan Syariah Bank
Jaringan ATM	Jaringan ATM Meliputi: ATM Bank Syariah Bukopin ATM Bank Bukopin ATM Prima
Jumlah Pegawai	8751

Sumber: www.syariahbukopin.ac.id

2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Bukopin

- a) Visi: “Menjadi Bank Syariah Pilihan dengan Pelayanan Terbaik”
- b) Misi:
 - 1. Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah
 - 2. Membentuk sumber daya insani yang profesional dan amanah

3. Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil & Menengah)
 4. Meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder
- c) Nilai-nilai Perusahaan:
1. Amanah
 2. Integritas
 3. Peduli
 4. Kerjasama
 5. Kualitas.⁶⁷

Untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan arah kebijakan PT. Bank Syariah Bukopin menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

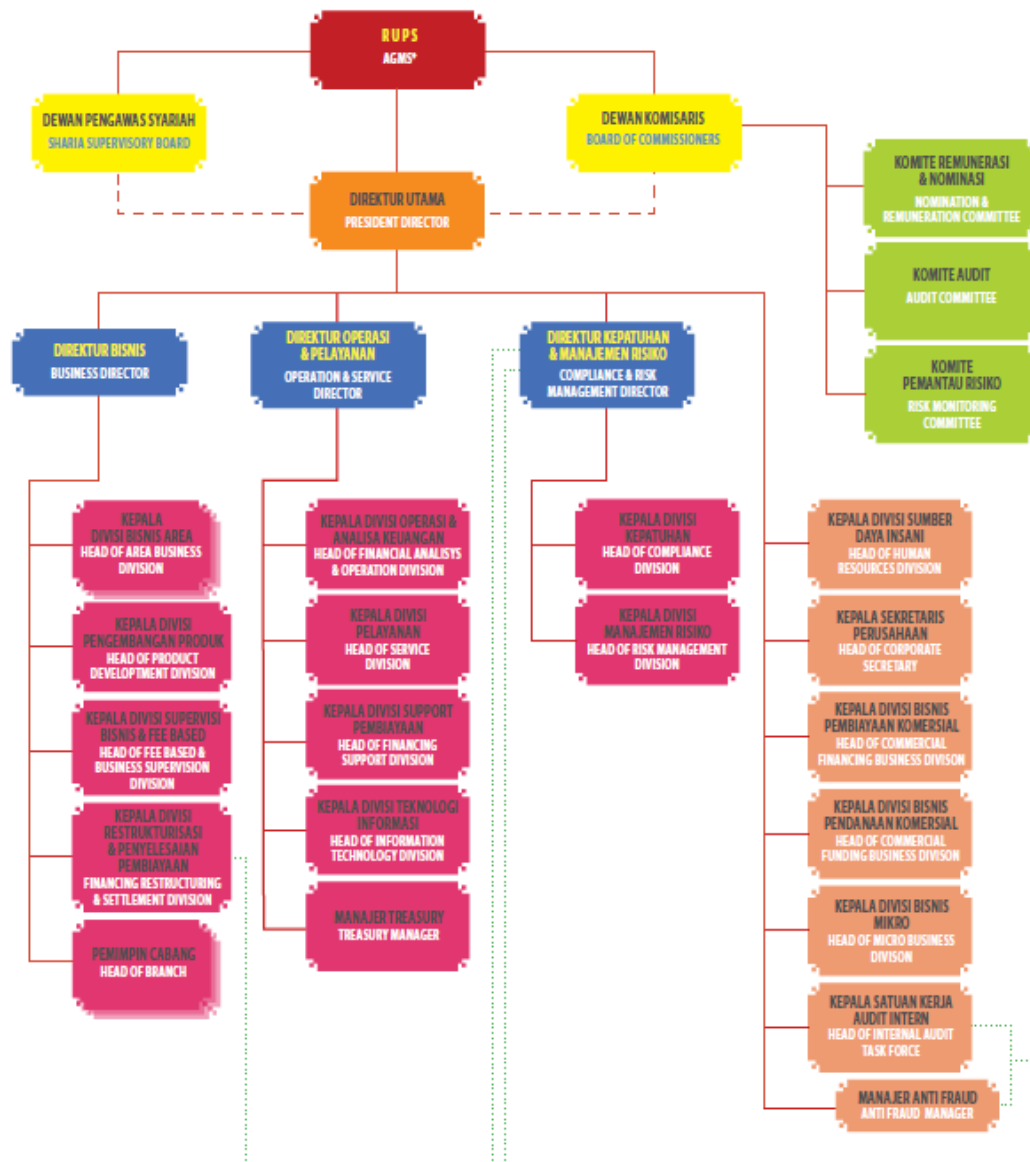
- a. Pengembangan usaha dengan fokus pada sektor usaha UMKM
- b. Mengembangkan usaha komersial
- c. Mengembangkan usaha konsumen
- d. Penyediaan jasa-jasa fee-based kepada nasabah
- e. Memperkuat teknologi dan pelayanan
- f. Menambah dan mengoptimalkan jaringan outlet
- g. Memperkuat SDI
- h. Peningkatan kualitas pengelolaan risiko dan kepatuhan⁶⁸

⁶⁷ www.syariahbukopin.co.id, diakses 31 Juli 2016, jam 16.30 WITA

⁶⁸ Laporan Tahunan 2014 Bank Syariah Bukopin, *Transformation of Business to Achieve Quality Growth*, h. 2

3. Struktur PT. Bank Syariah Bukopin

Gambar 4.1 Struktur PT. Bank Syariah Bukopin



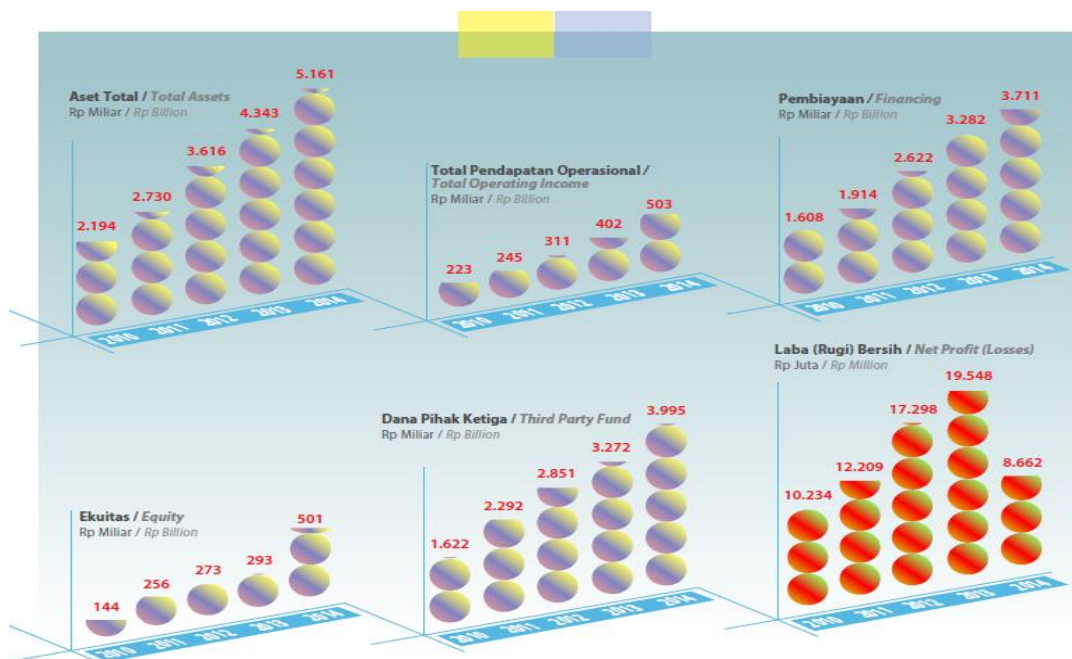
Sumber: buku laporan tahunan 2014 bank syariah bukopin

4. Ikhtisar Keuangan 2010-2014 PT. Bank Syariah Bukopin

Tabel 4.2 Ikhtisar Keuangan 2010-2014

(Dalam Juta Rupiah) KETERANGAN	2010	2011	2012	2013	2014	(In Million Rupiah) ITEM
Aset Total	2.193.952	2.730.027	3.616.108	4.343.069	5.161.300	Total Asset
Pembiayaan	1.608.206	1.914.492	2.622.023	3.281.655	3.710.720	Financing
Dana Pihak Ketiga	1.621.913	2.291.738	2.850.784	3.272.263	3.994.957	Third Party Fund
Ekuitas	143.565	255.774	273.072	292.620	501.282	Equity
Jumlah Pendapatan Operasional	223.155	245.306	311.220	401.503	502.834	Total Operating Income
Jumlah Beban Operasional	208.802	230.239	285.058	370.556	486.374	Total Operating Expenses
Laba Rugi Tahun Berjalan setelah Pajak	10.234	12.209	17.298	19.548	8.662	Current Year Profit (Loss) After Tax
Rasio (%)						
Rasio Kecukupan Modal	11,51	15,29	12,78	11,10	15,85	Capital Adequacy Ratio (CAR)
Laba Bersih terhadap Rata-rata Aset	0,74	0,52	0,55	0,69	0,27	Return on Asset (ROA)
Laba Bersih terhadap Rata-rata Modal	9,65	6,19	7,32	7,63	2,44	Return on Equity (ROE)
Total Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga	99,15	83,54	91,98	100,29	92,89	Financing to Deposit Ratio (FDR)
Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan	3,81	1,74	4,59	4,27	4,07	Non Performing Financing (NPF)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional	93,57	93,86	91,59	92,29	96,73	Operating Expense to Operating Income

Grafik 4.1 Ikhtisar Keuangan 2010-2014



Sumber: buku laporan tahunan 2014 bank syariah bukopin

B. Produk PT Bank Syariah Bukopin**1. Pendanaan**

- a) Tabungan iB Siaga
- b) Tabungan SimPel iB
- c) Tabungan iB Haji
- d) Tabungan iB Multiguna
- e) Tabungan iB Pendidikan
- f) Tabungan iB SiAga Bisnis
- g) TabunganKu iB
- h) Deposito iB
- i) Deposito iB On Call
- j) Giro iB
- k) Giro iB (Matic)

2. Pembiayaan

- a) Murabahah
- b) Musyarakah
- c) Mudharabah
- d) Mudharabah Muqoyyadah
- e) iB Pinjaman *Qardh*
- f) iB Istishna
- g) iB Istishna Pararel
- h) iB Kepemilikan Mobil
- i) iB Kepemilikan Rumah

- j) Pembiayaan iB K3A
- k) Pembiayaan iB KKPA - Relending Syariah
- l) iB Jaminan Tunai
- m) iB Pembiayaan Pola Channeling
- n) iB SiaGa Emas Gadai
- l) iB Kepemilikan Emas
- o) iB SiAga Pendidikan
- p) iB SiAga Pensiun

3. Jasa

- a) ATM SiAga Syariah
- b) SiAga Visa Electron Syariah
- c) SMS Banking Syariah Bukopin
- d) Internet Banking Syariah Bukopin
- e) Cash Management
- f) Save Deposit Box (SDB)
- g) Paymennt Point
- h) Transfer
- i) Kliring
- j) InkasoRTGS
- k) SKBDN iB
- l) Bank Garansi iB
- m) Hallo BSB.⁶⁹

⁶⁹ www.syariahbukopin.co.id, diakses 31 Juli 2016, jam 17.30 WITA

C. Pelaksanaan Gadai Emas pada produk iB Siaga Emas Gadai Bank Syariah Bukopin

1. Produk iB Siaga Emas Gadai

Sasaran gadai emas adalah seluruh masyarakat yang membutuhkan dana dan memiliki barang jaminan emas baik berupa logam mulia antam maupun lokal dan/atau perhiasan. Pembiayaan iB Siaga Emas Gadai merupakan produk pembiayaan dimana Bank memberikan fasilitas pinjaman berdasarkan prinsip *qardh* kepada Nasabah dengan menjaminkan emas. Emas yang diagunkan tersebut akan disimpan dan dipelihara oleh Bank, dan atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya sewa dengan prinsip *ijarah*.⁷⁰

Manfaat dalam produk ini yaitu:

- a. Mendapatkan dana secara mudah dan cepat untuk berbagai kebutuhan yang mendesak.
- b. Proses cepat dan persyaratan mudah.
- c. Penyimpanan aman dan berasuransi.
- d. Ujroh/10 hari 0,33% dari nilai taksiran
- e. Nilai pinjaman 80% dari rata-rata harga jual emas dan harga beli kembali ANTAM.
- f. Biaya administrasi ringan dan dibayar dimuka.
- g. Bebas biaya pinalti untuk pelunasan sebelum masa jatuh tempo.
- h. Mendapatkan Surat Bukti iB Siaga Emas (sertifikat gadai)⁷¹.

⁷⁰ Wawancara dengan Yogi Dwi Pranoto, tanggal 30 juli 2016 di kantor bank syariah bukopin

⁷¹ Wawancara dengan Yogi Dwi Pranoto, tanggal 30 juli 2016 di kantor bank syariah bukopin

Fitur dalam produk ini yaitu:

- a. Emas dalam bentuk perhiasan/batangan/lantakan/koin/uang emas minimal 16 karat.
- b. Jumlah maksimum pembiayaan adalah Rp250.000.000,- per Nasabah.
- c. Jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari dan dapat diperpanjang maksimal 2x.

Syarat dan Ketentuan yaitu:

- a. Merupakan nasabah perorangan.
- b. Memiliki kartu identitas KTP/SIM/Paspor.
- c. Mengisi Aplikasi Permohonan iB Siaga Emas.
- d. Menyerahkan barang agunan berupa emas dengan kadar minimal 70% atau 16 karat.
- e. Memiliki/membuka rekening Tabungan iB Siaga/Tabungan iB Siaga Bisnis/Giro iB di Bank Syariah Bukopin⁷².

Penaksiran emas di BSB didasarkan pada Standar Logam Mulia (SLM) yang berlaku di BSB. Adapun Standar Logam Mulia Bank Syariah Bukopin yaitu⁷³:

⁷² Wawancara dengan Yogi Dwi Pranoto, tanggal 30 juli 2016 di kantor bank syariah bukopin

⁷³ Wawancara dengan Yogi Dwi Pranoto, tanggal 30 juli 2016 di kantor bank syariah bukopin

Tabel 4.3 Standar Logam Mulia Bank Syariah

Tingkat Karatase (Karat)	Nilai (Rp)
24	557250
23	534031
22	510813
21	487594
20	464375
19	441156
18	417938
17	394719
16	371500

Sumber: data bank syariah bukopin

Penilaian barang jaminan di BSB dilakukan oleh penaksir. Penaksir menggunakan timbangan, batu uji, jarum uji, air uji dan tera untuk mengukur berat jenis. Berat jenis diperoleh dari perhitungan berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Berat Jenis} = \frac{\text{berat kering}}{\text{berat kering} - \text{berat volume}}$$

Selanjutnya juru taksir menghitung nilai taksiran dengan rumus :

$$\text{Nilai Taksiran} = \text{SLM berdasarkan tingkat karatase} \times \text{berat emas}$$

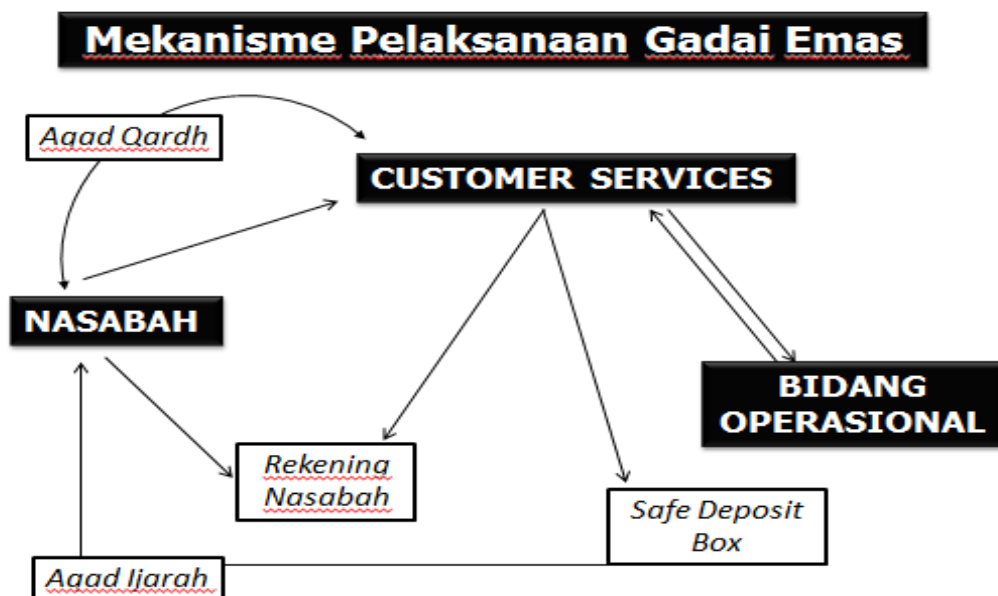
Selanjutnya menentukan nilai pembiayaan yang dapat diterima oleh nasabah dengan cara berikut:

$$\text{Nilai Pembiayaan} = 80\% \times \text{Nilai Taksiran}$$

Besar jumlah maksimum pembiayaan adalah Rp. 250.000.000,- per Nasabah. Selain penilaian terhadap emas yang akan digadaikan penilaian juga dilakukan pada biaya-biaya yang menyertai transaksi ini. Adapun biaya yang dimaksud adalah biaya sewa dan biaya administrasi⁷⁴.

2. Mekanisme pemberian pembiayaan gadai emas di PT. Bank Syariah Bukopin (BSB)

Gambar 4.2 Mekanisme Gadai Emas



Sumber: data yang diolah

Fungsi yang terkait dengan prosedur pemberian pembiayaan ini adalah customer service sebagai juru taksir, pimpinan bidang operasional, dan nasabah itu sendiri. Adapun formolir yang digunakan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Bukti Gadai (Sertifikat Gadai), Surat permohonan gadai emas.

⁷⁴ Wawancara dengan Yogi Dwi Pranoto, tanggal 30 juli 2016 di kantor bank syariah bukopin

- a. Calon nasabah datang kepada customer service untuk memperoleh pembiayaan gadai emas dengan membawa KTP/SIM/PASPOR, Buku Tabungan berlabel BSB, dan jaminan dalam bentuk emas
- b. Nasabah mengisi formolir pembiayaan nasabah yang diberikan oleh customer services
- c. Jaminan kemudian ditaksir oleh pihak BSB
- d. Customer menentukan maksimal nilai pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yaitu 80% dari nilai taksiran
- e. Customer service meminta persetujuan ke bidang operasional untuk pembiayaan
- f. Customer services menjelaskan besarnya biaya ujroh yang ditanggung oleh nasabah
- g. Nasabah dan customer services melakukan akad qardh
- h. Nasabah menandatangani akad
- i. Nasabah menerima Surat Bukti Gadai
- j. Nasabah menerima pembiayaan melalui rekening tabungan
- k. Jaminan disimpan di *safe deposit box* bank syariah bukopin

Berdasarkan observasi Sebagaimana diketahui bahwa tulisan-tulisan dalam beberapa perjanjian seperti form akad yang ada di bank syariah dibuat dalam ukuran kecil, mulai dari ukuran 9 sampai dengan 10. Faktor tersebut akan mengakibatkan ketentuan-ketentuan dalam akad yang akan ditandatangani tidak akan diketahui oleh nasabah secara menyeluruh apalagi nasabahnya usia lanjut. Mengingat, waktu layanan yang diberikan oleh bank begitu cepat sehingga tidak

ada proses pemberitahuan isi pasal-pasal yang akan di tandatangani pada saat proses penyaluran pembiayaan. ditambah dengan ke-engganan atau kemalasan nasabah untuk membaca isi akad. Jika hal ini yang terjadi, maka nasabah adalah pihak yang dapat dirugikan.

Dalam khazanah hukum Islam (syariah), bahwa akad memiliki beberapa azas, di antaranya kemampuan, saling menguntungkan, amanah, *taisir* (kemudahan), *ikhtiyati* (kehati-hatian), *luzum* (tidak berubah), *taswiyah* (kesetaraan), transparansi, itikad baik dan lain sebagainya. Segala usaha yang dilakukan dalam rangka memenuhi azas-azas tersebut akan berdampak pada kesempurnaan akad. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut 'KHES') Bab II tentang Asas Akad pada Pasal 21 g dinyatakan: "Transparansi; Setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka."⁷⁵

Terkait dengan iB Gadai Emas di BSB, menurut penulis azas transparansi tidak dipenuhi oleh BSB yang dicerminkan dari tidak adanya proses pemberitahuan isi pasal-pasal yang akan di tandatangani pada saat proses penyaluran pembiayaan, sehingga tidak sesuai dengan syariah. BSB harus memberikan informasi tentang pasal-pasal akad iB Gadai Emas yang akan ditandatangani oleh nasabah sehingga nasabah tidak dirugikan.

Hasil penelitian mengenai Pelunasan pembiayaan dapat dilakukan dengan pelunasan seluruh pembiayaan dan pelunasan sebagian pembiayaan. Fungsi yang terkait yaitu CS, Teller, pimpinan bidang operasional, dan nasabah itu sendiri.

⁷⁵ Ika Fauzia Yunia & Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 30

Formolir yang digunakan yaitu Surat Bukti Gadai, Buku Rekening, dan Slip Setoran. CS menerima SBG dari nasabah kemudian menghitung biaya yang harus dilunasi nasabah. CS membuat Slip Setoran dan nasabah melakukan pelunasan di teller. Slip Setoran dengan tanda lunas diserahkan ke CS kemudian diteruskan kepada pimpinan bidang operasional untuk mengambil barang. Barang kemudian diserahkan kepada nasabah.⁷⁶

Ketentuan mengenai akad *qardh* yang terdapat dalam Surat Bukti Gadai Emas, bank menerima barang jaminan dari nasabah untuk menjamin pelunasan pembiayaan, jika nasabah tidak melaksanakan pembayaran pada saat jatuh tempo nasabah akan diperingatkan oleh pihak bank dan diberikan penambahan jangka waktu, tetapi jika nasabah belum juga dapat melunasi pinjamannya maka bank akan menjual emas atau barang jaminan dan hasilnya digunakan untuk melunasi pinjaman nasabah jika hasil penjualan tidak dapat menutupi semua pinjaman maka nasabah harus membayar kekurangannya dan jika hasil penjualan melebihi, maka akan dikembalikan kepada nasabah.

Ketentuan akad dalam hal pelunasan pembiayaan/pinjaman pada produk gadai emas syariah tersebut di atas didasarkan pada prinsip keadilan dan adanya sikap toleransi kepada nasabah dalam penagihan piutang. Bank sebagai pihak yang berpiutang berlaku longgar dan memberikan kesempatan atau tambahan jangka waktu kepada nasabah untuk melunasi pembiayaannya sebagaimana Allah swt berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 280 adapun terjemahannya sbb: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia

⁷⁶ Wawancara dengan Yogi Dwi Pranoto, tanggal 30 juli 2016 di kantor bank syariah bukopin

berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Ketentuan akad dalam penjualan barang gadai, didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh prof. Dr. Abdullah bin Muhammad ath-thayyar dalam bukunya Ensiklopedi Fiqhi Muamalah bahwa penjualan barang gadai adalah sah bila penggadai tidak mampu membayar hutangnya. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang.

Penjualan barang jaminan dilaksanakan melalui mekanisme lelang secara terbuka maupun dijual dibawah tangan. Fungsi yang terkait adalah pimpinan bidang operasional, panitia lelang, dan teller. Formolir yang digunakan antara lain Surat Permohonan gadai Emas, Berita Acara, dan Nota Kredit. Pimpinan bidang operasional membentuk panitia lelang. Pimpinan bidang operasional mengeluarkan barang jaminan yang telah lewat masa temponya untuk dilakukan penaksiran ulang. Hasil taksiran baru dituliskan pada Surat Permohonan Gadai Emas. Penjualan barang jaminan dilakukan oleh panitia lelang. Hasil penjualan dicantumkan dalam formolir berupa berita acara yang kemudian diserahkan kepada teller untuk input data. Jika terdapat kelebihan hasil penjualan ditransfer kerekening nasabah.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan Yogi Dwi Pranoto, tanggal 30 juli 2016 di kantor bank syariah bukopin

3. Analisa akad iB Siaga Emas Gadai

a. Akad *qardh*

Produk iB Siaga Emas gadai pada Bank syariah Bukopin menggunakan akad *Qardh* dan dikenakan biaya sewa atas penyimpanan dan pemeliharaan dengan prinsip *ijarah*. Suatu akad dinyatakan sah untuk dilaksanakan apabila rukun dan syarat dari akad tersebut dipenuhi secara sempurna yang meliputi pihak yang berakad, sighat, objek akad dan tujuan dari akad. Sebagaimana besar akad dalam hukum Islam memiliki rukun dan syaratnya yang menjadi pembeda dari masing-masing akad. Rukun dan syarat akad tersebut wajib dinyatakan secara jelas dalam dokumen akad yang akan ditandatangani oleh masing-masing pihak. Sebagai contoh adalah akad jual beli tangguh yang dibuat secara tertulis. Akad ini ditujukan untuk melakukan perikatan jual beli atas suatu barang secara tangguh. Kejelasan para pihak yang berakad dinyatakan melalui pencantuman nama dan peran masing-masing pihak, seperti Irham sebagai pembeli dan Andi sebagai penjual. Kejelasan objek akad dinyatakan melalui pencantuman spesifikasi barang yang dijual-belikan, sedangkan kejelasan sighat dinyatakan melalui pencantuman pernyataan kesepakatan antara kedua pihak yang diperkuat dengan pembubuhan tanda tangan.

Terkait dengan Gadai Emas iB di BSB, Penggunaan Akad *Qardh* telah mengakibatkan ketidakjelasan terhadap seluruh rukun akad. Akad tersebut dapat berarti bahwa BSB dan Nasabah terikat dalam transaksi *qardh* beserta seluruh rukun dan syaratnya, sementara kalau dilihat dari mekanisme atau bahkan dilihat dari nama produk, BSB menggunakan konsep akad *rahn*, yang dimana kedua

akad tersebut yaitu akad *qardh* dan *rahn* memiliki perbedaan jika dilihat dari rukun akad masing-masing.

Selain itu melihat rukun akad *qardh* yang dipraktekkan oleh bank syariah terdiri atas;

1. Bank syariah itu sendiri sebagai penerima gadai
2. Nasabah sebagai penggadai
3. Emas sebagai barang gadai
4. Dana yang dipinjam
5. ijab dan qabul.

Meninjau dengan membandingkan rukun akad *qardh* dalam fiqhi muamalah terdiri atas;

- 1) Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), dan *muqridh* (pemberi pinjaman)
- 2) Objek akad yaitu *qardh* (dana)
- 3) Tujuan, yaitu '*iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan
- 4) *Shighah*, yaitu *Ijab dan Qabul*⁷⁸

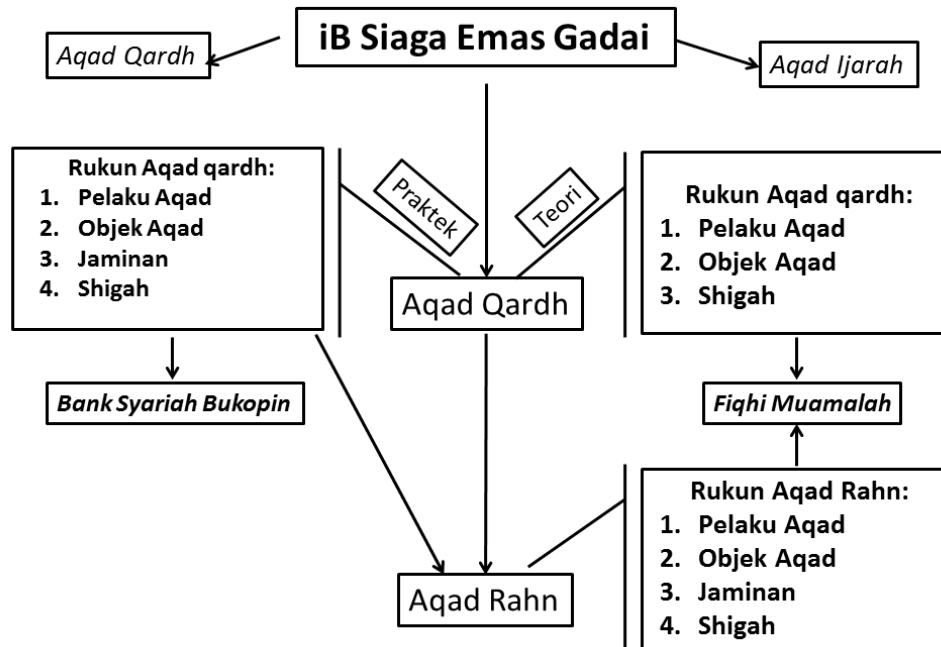
Berikut rukun akad *rahn* dalam fiqhi muamalah yaitu:

- 1) Barang yang digadaikan
- 2) Modal hasil gadaian
- 3) *Shighah*
- 4) '*aqdain* (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai).⁷⁹

⁷⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, h. 48.

Lebih jelasnya dapat dilihat bagan berikut ini:

gambar 4.3: perbandingan rukun akad



Sumber: data yang diolah

Berdasarkan hasil analisa, menurut penulis Akad *Qardh* di BSB tidak sesuai dengan rukun akad *qardh* secara teoritis, rukun akad *qardh* yang dipraktekkan oleh bank syariah lebih mirip kepada akad *rahn* secara teoritis, sehingga jika melihat dari rukun akad dalam teori fiqhi muamalah akad *qardh* yang digunakan oleh BSB dalam produk iB Siaga Emas Gadai seharusnya menggunakan akad *rahn*.

Mengenai syar'i tidaknya penggunaan akad *qardh* dalam peoduk iB Siaga Emas Gadai dalam BSB tidak bisa dikatakan bahwa itu tidak syar'i karena akad *qardh* dan akad *rahn* sama-sama berasal dari akad hutang-piutang hanya saja jika dilihat dari rukunnya memiliki perbedaan. Kalau akad *qardh* yaitu hutang piutang

⁷⁹ Abudullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqhi Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, h. 175.

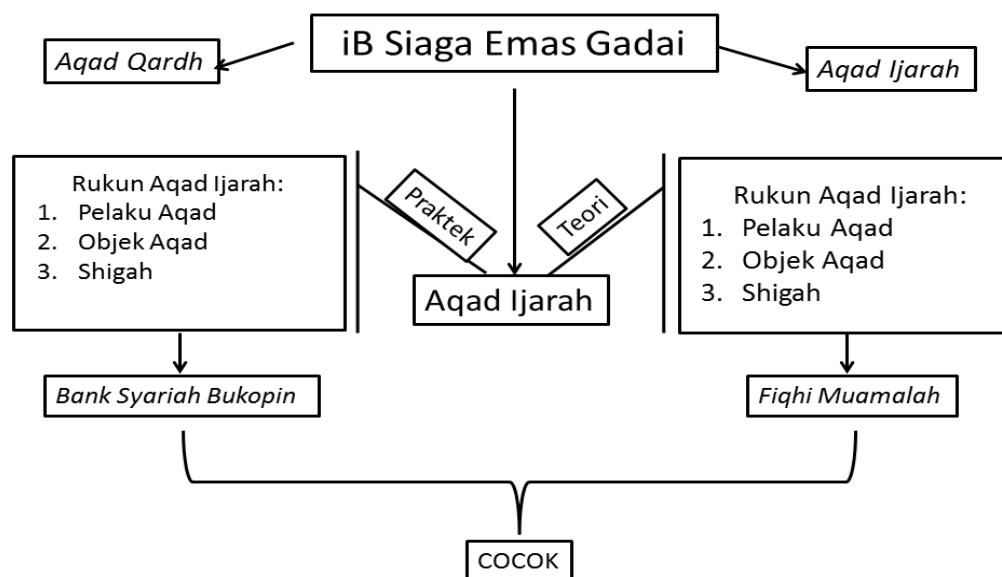
tanpa jaminan dari seorang peminjam sedangkan akad *rahn* yaitu hutang piutang dengan menggunakan jaminan. Sehingga dapat dikatakan praktek tersebut tetap saja boleh hanya saja terjadi kesalahan nama dalam memberikan nama akad yang dipraktikkan yang seharusnya menggunakan akad *rahn*.

b. Akad *Ijarah*

Merujuk pada dokumen biaya sewa dengan prinsip *ijarah* yang dibuat oleh BSB sebagai dasar pengenaan ujroh gadai, maka dapat dilihat rukun *ijarah* yang diterapkan oleh bank syariah bukopin yaitu:

1. Pemberi sewa (*mu'jir*) dalam hal ini adalah BSB
2. Penyewa (*musta'jir*) dalam hal ini adalah nasabah
3. Manfaat objek sewa (*ma'jur*)
4. Harga sewa (*ujroh*)
5. Ijab qabul (*shigah*)

Gambar 4.4: perbandingan rukun akad



Sumber: data yang diolah

Secara umum konstruksi biaya sewa dengan prinsip *ijarah* (selanjutnya disebut "Akad *Ijarah*") yang dibuat oleh BSB telah memenuhi syarat & rukun yang membentuk Akad *Ijarah*. Biaya sewa yang diterapkan oleh bank syariah merupakan atas biaya penyimpanan barang gadai di *safe deposit box* yang dijaga oleh satpam, agar barang tersebut aman dan terkendali.

Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 yaitu:

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai
3. Ongkos sebagaimana yang dimaksud ayat 1 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad.

Hal ini berbeda yang diungkap oleh ustadz shiddiq al-jawi dalam tulisannya di Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan bahwa gadai emas yang sering dipraktekkan di lembaga keuangan syariah haram hukumnya dengan tiga alasan sbb:

- a. Gadai emas terjadi pengambilan manfaat atas pemberian utang.

Pengambilan manfaat atas pemberian utang walaupun disebut *ujrah* atas jasa penitipan, namun hakikatnya hanya rekayasa hukum (*hilah*) untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian utang, baik berupa tambahan (*ziyadah*), hadiah, atau manfaat lainnya. Padahal manfaat-manfaat ini jelas

merupakan riba yang haram hukumnya. Dari Anas RA, bahwa Rasulullah SAW, ”Jika seseorang memberi pinjaman (*qardh*), janganlah dia mengambil hadiah.” (HR Bukhari, dalam kitabnya *At-Tarikh Al-Kabir*). Imam Ibnul Mundzir menyebutkan adanya *ijma'* ulama bahwa setiap tambahan atau hadiah yang disyaratkan oleh pihak yang memberikan pinjaman, maka tambahan itu adalah riba.

- b. fee (*ujrah*) untuk jasa penitipan/ penyimpanan dibebankan kepada penggadai (*rahin*), yaitu nasabah.

Jasa penitipan/ penyimpanan seharusnya dibebankan kepada penerima gadai (*murtahin*), yaitu bank syariah, bukan nasabah. Dalilnya sabda Rasulullah SAW: ”Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya, dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.” (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan Nasa'i).

- c. Gadai emas terjadi akad rangkap

Gabungan akad *rahn* dan *ijarah*. Akad rangkap tidak boleh menurut syara', mengingat terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA, beliau berkata: “Nabi SAW melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan” (HR Ahmad, *Al-Musnad*, I/398).⁸⁰

⁸⁰ Dakwah Ustadz Siddiq Al-jawie dalam tulisannya di Hizbut Tahrir Indonesia, <https://hizbut-tahrir.or.id/2011/10/07/hukum-gadai-emas>, 12 Oktober 2016, 09:55 Am

Menurut Ustadz Siddiq al Jawie Berdasarkan tiga alasan tersebut, gadai emas haram hukumnya. Ditegaskan pula, fatwa DSN MUI mengenai gadai emas adalah keliru dan tidak halal diamalkan oleh kaum muslimin. (*Wallahu a'lam*)

Menurut buya yahya pendiri pondok pesantren dalam dakwahnya mengatakan; barang yang digadaikan boleh diletakkan di orang yang meminjam uang atau di orang yang meminjamkan uang ... dan biaya perawatan di tanggung oleh yang punya barang⁸¹

Tinjauan dari pandangan 4 mazhab mengenai pemanfaatan gadai dalam hal ini adalah hanbaliyah, hanafiyah, malikiyah, dan syafi'iyah dapat dilihat berikut ini:

1. Perspektif Hanbaliyah

Apabila barang gadaian merupakan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin pihak yang menggadaikan, karena barang gadaian dan apa yang dihasilkannya adalah milik pihak yang menggadaikan. Apabila barang gadaian membutuhkan perawatan dan pemeliharaan, seperti binatang ternak, maka pihak penggadai boleh memanfaatkannya.⁸² Jika pemegang gadai meminta izin kepada penggadai untuk memanfaatkan barang gadaian tanpa kompensasi dan modal dari gadai dianggap sebagai hutang, maka yang demikian ini tidak sah karena telah menjadi hutang dengan menarik manfaat.⁸³

⁸¹ Video dakwah buya yahya tentang hukum gadai, di download dari www.youtube.com, 16-10-2016, 13;15

⁸² Imam Mustofa, *Fiqhi Muamalah Kontemporer*, h. 201

⁸³ Abudullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqhi Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, h. 177

Berdasarkan pada perspektif hanbaliyah diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali barang tersebut membutuhkan perawatan dan pemeliharaan. Dengan meninjau hasil penelitian bahwa emas yang digadaikan di BSB membutuhkan biaya perawatan/ pemeliharaan/ penyimpanan/ pengamanan, agar emas tersebut aman dan terkendali sehingga terdapat biaya sewa yang nyata-nyata diperlukan. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002

2. Perspektif Hanafiyah, malikiyah dan syafi'iyah

Mayoritas fuqaha dari kalangan hanafiyah, malikiyah, dan syafi'iyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian karena manfaatnya tetap menjadi hak penggadai, Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh ad-daruquthi dan al-hakim yang artinya: “dia berhak mendapatkan bagiannya dan berkewajiban membayar hutangnya”.⁸⁴

Berdasarkan hal tersebut ketika ditinjau gadai emas di BSB bahwa emas yang digadaikan oleh nasabah tidak dimanfaatkan oleh BSB melainkan disimpan di *safe deposit box* dengan tujuan agar barang gadaian aman dan terkendali dan diamankan oleh penjaga, sehingga atas penyimpanan itu terdapat biaya penyimpanan atau biaya sewa, sehingga nasabah berhak untuk mengambil bagiannya, yaitu menanggung biayanya. Hal ini sesuai dengan hadits yang didasarkan oleh kalangan hanafiyah, malikiyah dan syafi'iyah yaitu: “dia berhak mendapatkan bagiannya dan berkewajiban membayar hutangnya, dan berdasarkan pula pada kaidah fiqhi yang menyatakan. “Pada dasarnya segala bentuk muamalat

⁸⁴ Abudullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqhi Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, h. 178

boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Oleh karena itu pengambilan biaya sewa di BSB boleh, selama tidak ada yang merasa dirugikan dan sama-sama mengambil mashlahat didalamnya. (*wallahu ‘alam*)

Melihat fatwa DSN MUI, perspektif Ustadz Siddiq al Jawie, dan buya yahya, kemudian tinjauan penulis terhadap pandangan 4 mazhab (hanbaliyah, hanafiyah, malikiyah, dan syafi’iyah) terdapat perbedaan pendapat. Namun, menurut penulis jika gadai emas di lembaga keuangan syariah masih dalam perdebatan maka berarti masih ada celah untuk memanfaatkan produk gadai emas, hanya saja sedikit berhati-hati, jika produk tersebut mendatangkan mashlahat tidak ada salahnya untuk menggunakannya.

D. Asumsi Perhitungan Gadai Emas pada Bank Syariah Bukopin

Contoh perhitungan pembiayaan gadai emas:

“Nasabah N memiliki emas logam mulia (emas murni 24 karat) seberat 15 gram. N ingin menggadaikan emas tersebut. Standard logam mulia (SLM) di PT Bank Syariah Bukopin Rp. 557.250,-, Berapa pembiayaan yang dapat diperoleh N Jika biaya administrasi Rp. 25.000,- dan Ujroh 0,33% dari nilai taksiran ?

Pembiayaan yang dapat diperoleh N dari Bank Syariah Bukopin adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Taksiran} &= \text{SLM berdasarkan tingkat karatase} \times \text{berat emas} \\
 &= \text{Rp. 557.250,-} \times 15 \text{ g} \\
 &= \text{Rp. 8.358.750,-}
 \end{aligned}$$

Pembiayaan yang didapatkan oleh nasabah yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Pembiayaan} &= 80\% \times \text{Nilai Taksiran} \\ &= 80\% \times \text{Rp. 8.358.750,-} \\ &= \text{Rp. 6.687.000,-}\end{aligned}$$

Jadi, total pembiayaan yang didapatkan oleh nasabah dengan biaya administrasi Rp. 15.000,- dan biaya *Ujroh* yaitu:

$$\begin{aligned}\text{Ujroh} &= 0,33\% \times \text{Nilai Taksiran} \\ &= 0,33\% \times \text{Rp. 8.358.750} \\ &= \text{Rp. 27583, 875}\end{aligned}$$

Maka:

$$\begin{aligned}\text{Total Nilai Pembiayaan} &= \text{Rp. 6.687.000} - \text{Rp. 15.000} - \text{Rp. 27583,875} \\ &= \text{Rp. 6.644.416,125}\end{aligned}$$

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pelaksanaan gadai emas

Berdasarkan observasi pada mekanisme pelaksanaan gadai emas peneliti tidak melihat CS menjelaskan isi pasal dalam akad yang ditandatangani oleh nasabah dan peneliti melihat pula *font* dalam tulisan isi pasal dalam akad berukuran 9-10 sehingga akan membuat nasabah malas untuk membacanya karena berukuran kecil ditambah lagi jika nasabah menderita rabun jauh, rabun dekat ataupun *presbyopia*.

Hal ini menyebabkan sehingga mekanisme dalam dalam praktek gadai emas tidak memenuhi asas akad dalam KHES tentang Akad pasal 21 huruf g yaitu Transparansi; Setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka

2. Aqad yang digunakan dalam gadai emas

a. Akad *qardh*

Berdasarkan hasil analisa, menurut penulis Akad *Qardh* di BSB tidak sesuai dengan rukun akad *qardh* secara teoritis, rukun akad *qardh* yang dipraktekkan oleh bank syariah lebih mirip kepada akad *rahn* secara teoritis, sehingga jika melihat dari rukun akad dalam teori fiqhi muamalah akad *qardh* yang digunakan oleh BSB dalam produk iB Siaga Emas Gadai seharusnya menggunakan akad *rahn*.

b. Biaya sewa berdasarkan akad *ijarah*

Biaya sewa dalam gadai emas di BSB sudah sesuai dengan fatwa MUI DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas, namun berbeda paham dengan pendapat ustadz shiddiq al-jawi yang mengatakan secara tegas gadai emas di lembaga keuangan syariah haram hukumnya, dan menurut buya yahya hal yang sama dengan fatwa MUI DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, kemudian tinjauan penulis terhadap pendapat 4 mazhab mengenai penggunaan biaya sewa gadai emas sesuai dengan semestinya di BSB.

B. Saran

1. Melihat mekanisme pelaksanaan pembiayaan iB siaga emas gadai di BSB harus memberikan informasi tentang pasal-pasal akad iB Gadai Emas yang akan ditandatangani oleh nasabah sehingga nasabah tidak dirugikan dan agar lebih terlihat transparansinya.
2. Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah sebaiknya menggunakan nama akad yang lebih relevan dengan produknya.
3. Jika produk tersebut masih dalam perdebatan, maka manfaatkanlah dengan baik, yaitu dengan mengambil yang lebih banyak mashlahatnya dari pada mudharatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Azhim Sa'id Abdul, *Jual Beli*, Jakarta: Qisthi Press, 2008
- Basrowi & Suwandi. *Mamahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Caporaso James, Levine David, *Teori-Teori Ekonomi Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Chaundhry Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta; Kencana, 2012
- FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn
- FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas
- Fauzia Yunia Ika & Kadir riyadi Abdul. *Prinsip Eknomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah*, Jakarta: Kencana, 2015
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, Surabaya: Kencana, 2010
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014
- Kuncoro Mudrajad. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Laporan Tahunan 2014 Bank Syariah Bukopin, *Transformation of Business to Achieve Quality Growth*
- Mardani, *Fiqhi Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Misbach Irwan. *Bank Syariah, kualitas layanan, kepuasan, dan kepercayaan*, Makassar: Alauddin University Press, 2013
- Moleong Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Resdakarya, 2009
- Muhammad Ath-Thayyar Abudullah. *Ensiklopedi Fiqhi Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015
- Muslahuddin Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Mustafa, dkk, *Ekonomi Islam*, Jakarta:Kencana 2006

- Mustofa Imam, *Fihi Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Nataatmadja Hidayat, *Pemikiran kearah ekkonomi Humanistik (Suatu Pengantar Menuju Citra Ekonomi Agamawi*, Yogyakarta: PLP2M, 1984
- Saliman Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta; Kencana, 2005
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015
- Sofyan Mulazid Ade. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syaria*, Jakarta; Kementerian Agama RI, 2012
- Subagyo P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alvabeta CV, 2013
- Suharto Frento, *Harga Emas Naik atau Turun Kita tetap Untung*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2015
- Supadil didilk ahmad, *Ekonomi Syariah (dalam pemberdayaan ekonomi rakyat)*, Semarang; Pustaka Rizki Putra, Maret 2013
- Supramono Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013
- Suyanto Bagong. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2010
- Syahdeini Sultan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2006
- www.syariahbukopin.ac.id
- www.youtube.com
- <https://hizbut-tahrir.or.id>

LAMPIRAN





REVERENSI VIDEO DAKWA DARI USTADS YAHYA DAN SIDDIQ ALJAWI



RIWAYAT HIDUP



Nama : Jamaluddin
 TTL : Mapilli/ 18 September 1991
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Alamat : BTN Patry Abdullah kel. samata_Gowa
 No Hp : 085145624854

Penulis bernama lengkap Jamaluddin lahir di Mapilli Kecamatan Luyo, kabupaten polewali mandar, Sulawesi Barat, pada tanggal 18 september 1991 merupakan anak bungsu dari lima bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri, bapak Tondeng dan Ibu Radia. Penulis sekarang bertempat tinggal di BTN Patry Abdullah Lorong 7 Kelurahan Samata Kabupaten Gowa.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 041 Inpres Puccadi di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat dan lulus pada tahun 2005, MTS DDI Baru' Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat lulus pada tahun 2008, MAN 1 POLMAN Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat lulus pada tahun 2011. Setelah Tamat di tahun 2012 penulis hijrah ke Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Makassar untuk melanjutkan perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi S1 Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulis menyelesaikan Magang Di Bank Syariah Bukopin pada tahun 2015 dan menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di tahun 2016, dan sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih dalam penyelesaian S1.